

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Perhitungan pendapatan nasional Indonesia dimulai dengan Produk Domestik Bruto, dapat dihitung atau diukur dengan menggunakan tiga macam pendekatan yaitu (1) pendekatan produksi; (2) pendekatan pendapatan (3) pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Dengan metode ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai tambah (value added) dari setiap proses produksi di dalam masyarakat (warga negara asing dan penduduk) dari berbagai lapangan usaha (sektor) dalam suatu negara untuk kurun waktu 1 (satu) periode (biasanya satu tahun). Ada 9 lapangan usaha yang mempengaruhi pendapatan nasional dilihat dari pendekatan produksi, yaitu :

1. pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
2. pertambangan dan penggalian
3. industri pengolahan
4. konstruksi bangunan
5. perdagangan, perhotelan, dan restoran
6. pengangkutan dan komunikasi
7. listrik, gas, dan air bersih
8. keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
9. jasa-jasa

Maksud dari metode produksi ini, jumlah seluruh hasil produksi (output) suatu negara dalam satu tahun dikalikan harga satuan masing-masing. Sehingga bila dituliskan dalam rumus akan nampak sebagai berikut:

$$PDB/Y = \{(Q1 \cdot P1) + (Q2 \cdot P2) + \dots + (Qn \cdot Pn) \}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional (PDB)

Q1 = Jumlah barang ke - 1

P1 = Harga barang ke - 1

Q2 = Jumlah barang ke - 2

P2 = Harga barang ke - 2

Qn = Jumlah barang ke - n

Pn = Harga barang ke - n

1. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, biasanya satu tahun. Jadi, berdasarkan metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga pelaku ekonomi (Rumah Tangga Konsumen, Rumah Tangga Produsen, Rumah Tangga Pemerintah dan Rumah Tangga Masyarakat Luar Negeri) di dalam suatu negara selama periode tertentu biasanya setahun. Hasil perhitungannya dinamakan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud adalah:

Tabel 2.1
PDB Menurut Pendekatan Pengeluaran

No. Rumah Tangga	Pengeluaran untuk	Lambang
1. Konsumen	Konsumsi (Consumption)	C
2. Produsen	Investasi (Investment)	I
3. Pemerintah	Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure)	G
4. Masyarakat Luar Negeri	Ekspor-impor (Export-Import) (X - M)	(X-M)

Dari tabel di atas, bila digambarkan dalam sebuah rumus, maka akan nampak sebagai berikut:

$$PNB/Y = C + I + G + (X - M)$$

Bila PNB (GNP) dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan **Pendapatan per Kapita.**

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada Rumah Tangga Produsen selama satu tahun. Pendapatan Nasional berdasarkan pendekatan ini metode pendapatan merupakan hasil penjumlahan dari sewa, upah, bunga modal dan laba yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi selama satu tahun. Balas jasa produksi dimaksud meliputi upah dan gaji; sewa tanah; bunga modal; dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut *nilai tambah bruto sektoral*. Oleh

sebab itu PDB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut:

Tabel 2.2
PDB Menurut Pendekatan Pendapatan

No.	Pemilik Faktor Produksi	Penerimaan	Lambang
1.	Alam	Sewa (rent)	r
2.	Tenaga Kerja	Upah/Gaji (wage)	w
3.	Modal	Bunga (interest)	i
4.	Skill	Laba (profit)	p

Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan atau metode pendapatan ini dinamakan Pendapatan Nasional (PN) atau National Income (NI). Dengan demikian bila digambarkan dalam rumus, maka akan nampak sebagai berikut:

$$PN / Y = r + w + i + p$$

2.1.1 Kegunaan Produk domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto yang disajikan dengan harga konstan akan bisa menggambarkan tingkat perubahan ekonomi di daerah itu, dan apabila ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan produk perkapita. Jika PDRB dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan perkapita yang dapat digunakan

sebagai indicator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain.

Penyajian atas dasar harga konstan bersama-sama dengan harga yang berlaku antara lain dapat dipakai sebagai indicator untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Penyajian PDRB secara sektoral dapat memperlihatkan struktur ekonomi di wilayah itu. Bila angka PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja, atau jumlah input yang digunakan, akan dapat menggambarkan tingkat produktivitas secara sektoral maupun menyeluruh.

Penyajian dalam bentuk input-output dapat menggambarkan hubungan fungsional antara sector satu dengan sector lain, dan bagaimana kenaikan output suatu sector mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada sector-sector lain.

Penyajian dalam bentuk neraca Regional akan dapat digambarkan bagaimana barang dan jasa itu diproduksi, dikonsumsi, diinvestasikan maupun diekspor, dan bagaimana sumber-sumber pembiayaan terhadap konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari sekedar uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa angka-angka yang disajikan oleh PDRB dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi baik mengenai struktur ekonomi di masa lalu, keadaan yang sedang berjalan maupun kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang.

Dengan demikian PDRB berfungsi sebagai :

1. Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi
2. Indikator tingkat pertumbuhan income per kapita
3. Indikator tingkat kemakmuran
4. Indikator tingkat inflasi dan deflasi

5. Indikator struktur perekonomian
6. Indikator hubungan antar sector

Oleh karena itu angka PDRB akan sangat berguna bagi para ahli yang bergerak dibidang perencanaan ekonomi, jangka pendek maupun jangka panjang, dan lain-lain kebijaksanaan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta (**Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2005: 29-38**)

2.1.2 PDRB Sebagai Siklus Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi secara garis besarnya dapat dikelompokkan kedalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi memproduksi barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi ini timbul pendapatan yang diterima oleh factor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat akan membeli barang dan jasa baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi.

Dengan demikian, maka nilai produk akhir dari barang dan jasa yang diproduksi (product) akan sama dengan pendapatan yang diterima oleh golongan-golongan dalam masyarakat (income) dan akan sama pula dengan jumlah pengeluaran oleh berbagai golongan dalam masyarakat (expenditure).

Karena itu maka Regional Product (Produk Regional), Regional Income (Pendapatan Regional), dan Regional Expenditure (Pengeluaran Regional), sebenarnya sama. Hanya cara melihatnya saja yang berbeda :

1. Kalau ditinjau dari segi produksi, Produk Regional adalah merupakan jumlah nilai produk akhir atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh

unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu dalam jangka waktu tertentu.

2. Atau kalau ditinjau dari segi pendapatan, pendapatan Regional adalah merupakan jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh factor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.
3. Atau apabila ditinjau dari segi pengeluaran, pengeluaran Regional adalah merupakan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2005:26)

2.2 Pengertian Pembangunan Pertanian

Menurut Mulyadi Banoewidjaya dalam **Idham Khalik** (2002: 47), pertanian di Indonesia dibedakan menjadi pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian rakyat, perkebunan, peternakan perikanan, dan kehutanan. Sedangkan pertanian dalam arti sempit ditujukan kepada pertanian rakyat, yaitu usaha pertanian bersama keluarga dimana diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija dan tanaman hortikultura lainnya.

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses untuk mencapai perubahan social serta pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Secara singkat mendefinisikan pembangunan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Lebih lanjut Roger dalam **Idham Khalik** (2002: 49),

menyatakan bahwa pembangunan adalah semacam perubahan social dimana ide-ide baru diperkenalkan kedalam suatu system social guna menghasikan pendapatan perkapita dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui cara produksi yang lebih modern, dan organisasi social lebih maju.

Jadi pembangunan pertanian diartikan sebagai suatu proses menciptakan perubahan-perubahan sosial/struktur sosial khususnya yang menyangkut masyarakat petani serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kegiatan bidang pertanian. Menurut Mulyadi Banoewidjaya dalam **Idham Khalik** (2002: 59), pembangunan pertanian adalah terus menerus menciptakan perubahan sosial penduduk terutama diarahkan pada segi pertanian, dalam arti kata masyarakat diajak menjadi semakin pandai, semakin terampil, bersenang-senang sehingga produktivitasnya dimasing-masing sub sector pertanian serta lain-lain meningkat.

Soedarsono Hadisapoetra dalam **Idham Khalik** (2002: 60), menyatakan bahwa pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang diarahkan untuk menambah produk perkapita, meningkatkan pendapatan nasional, dan maningkatkan produktivitas dengan jalan menambah modal dan skill. Dengan demikian pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk menambah produksi pertanian dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal memperbesar turut campurnya manusia dalam pekembangan berbagai jenis tanaman dan hewan serta alam sekitarnya.

2.2.1 Tahap-tahap Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian dibagi kedalam 3 tahap pembangunan :

1. Tahap pertama, pertanian yang produktivitasnya rendah atau disebut sebagai pertanian tradisional (subsisten), dalam pertanian subsisten produksi pertanian semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok petani. Produktivitasnya rendah karena menggunakan peralatan yang sederhana atau teknologi yang digunakan rendah. Sedangkan faktor tanah dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang utama. Pada tahap ini berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin menurun (*Law Of Diminishing Return*) karena terlalu banyak faktor tenaga kerja yang bekerja dilahan yang terbatas. Juga penggunaan teknologi yang rendah, lembaga social yang belum berkembang, jaringan komunikasi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang sangat minim menghambat pertumbuhan produksi.
2. Tahap kedua, tahap pertanian tradisional menuju pertanian modern, dimana pada tahap ini penganeekaragaman produk pertanian sudah mulai dilaksanakan. Produksi pertanian tanaman pangan tidak lagi mendominasi hasil pertanian tapi sudah muncul produk-produk lain berupa hasil perkebunan perikanan, dan peternakan. Tanaman pokok masih tetap dilaksanakan akan tetapi sentuhan teknologi sudah semakin besar perannya, seperti penggunaan hewan penarik bajak, traktor kecil serta penggunaan bibit unggul sudah mulai dilaksanakan disamping penggunaan pupuk dan system irigasi yang sangat mendukung dalam usaha meningkatkan produksi pertanian.

3. Tahap ketiga, adalah tahap yang disebut dengan pertanian modern atau pertanian spesialisasi menggambarkan tingkat pertanian yang semakin maju. Pertanian ini berkembang sebagai respon dari pembangunan menyeluruh dalam bidang-bidang lain lain dalam ekonomi nasional. Kenaikan tingkat kesejahteraan dan perluasan pasar baik pasar domestic maupun pasar internasional merupakan faktor-faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam menuju pertanian modern. Keuntungan komersial merupakan keberhasilan dan hasil maksimum perhektar pertanian merupakan tujuan yang utama. Produk yang dihasilkan terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, pembentukan modal dan kemajuan teknologi, penelitian dan pengembangan ilmiah memegang peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan jumlah produksi. Pertanian modern umumnya menitikberatkan pada salah satu jenis tanaman tertentu, intensifikasi modal, dan teknologi sehingga tenaga kerja manusia menjadi sedikit penggunaannya. Sekarang ini usaha pertanian yang demikian disebut sebagai Agribisnis.

2.2.2 Daya Dukung Sektor Pertanian

Ketika strategi pembangunan mulai dipikirkan, berbagai bentuk pandangan terjadi khususnya mengenai pemberian prioritas pada salah satu sektor perekonomian. Benturan tersebut sebenarnya mempersoalkan sector mana yang harus didorong sehingga mampu landasan yang kuat bagi system perekonomian nasional.

Pandangan yang condong kepada “Industrialisasi Sebagai Kunci” menurut **Idham Khalik (2002:39)** memberikan retorika nasional bahwa sector industri dianggap penting untuk dikembangkan karena penanaman modal disektor pertanian kurang menguntungkan, dengan perkataan lain Margin Rate Of Return dari sektor pertanian diperkirakan rendah, lagi pula karena tekanan perkembangan penduduk yang terus menerus meningkat maka sektor pertanian akan semakin terkena hukum kenaikan hasil yang semakin menurun (*Law Of Diminishing Return*). Hal ini menimbulkan koreksi dari pandangan industri, karena yang perlu didahulukan adalah sector industri dengan daya dukung dari sector lain yang mampu memberikan input (bahan baku) bagi sector industri itu sendiri.

Dengan melihat sejarah Jepang dimana proses tranformasi dapat berlangsung karena adanya pra-kondisi, yakni produktivitas pertanian yang sudah tinggi. Produktivitas pertanian yang sudah tinggi inilah merupakan titik tolak yang menjadikan Jepang memasuki masa industrialisasi. Sehingga proses transisi mampu melahirkan struktur perekonomian yang mapan. Sama halnya seperti yang diungkap oleh **Idham Khalik (2002:89)** dalam tesisnya mengatakan bahwa tanpa mengabaikan pandangan industrialisasi dan melihat dari pengalaman Negara maju, maka pembangunan pertanian justru perlu didahulukan, karena menurut para ahli ekonomi keberhasilan industrialisasi malahan tergantung dari suatu pembangunan pertanian yang menciptakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alasan mengapa daya dukung sektor pertanian sangat dibutuhkan dalam proses trasformasi :

1. Barang-barang hasil industri merupakan daya dukung dari daya beli masyarakat, karena sebagian besar pembilinya merupakan masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk negara berkembang. Maka tingkat pendapatan mereka perlu ditargetkan melalui pembangunan pertanian.
2. Dengan tersedianya bahan makanan yang murah, sehingga upah dan gaji yang diterima oleh para buruh dan pegawai lain hanya bisa tercapai apabila produksi pertanian dapat ditingkatkan sehingga harga bisa terjangkau.
3. Industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian dan karena itu produksi bahan-bahan pertanian memberikan basis bagi pertumbuhan itu sendiri.

Jika dikaji lebih dalam lagi, maka daya dukung sektor pertanian terhadap sektor lain lebih dari yang diungkap baik secara langsung maupun tidak langsung begitu juga jika dilihat dari segi dukung (keterkaitan) kedepan (*forward linkages*) yang mendorong timbulnya industri hilir, seperti industri pengolahan yang bahan bakunya dari sektor pertanian dan dari keterkaitan kebelakang (*backward linkages*) yang merangsang timbulnya industri-industri hulu, seperti industri pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian dan lain-lain.

Dengan demikian maka dalam transformasi sektor pertanian perlu mendapat perhatian, minimal tidak diabaikan karena pembangunan pertanian itu sendiri berarti menciptakan basis (daya dukung) yang kuat bagi daya dukung transformasi struktur ekonomi itu sendiri. Sehingga dengan dilaksanakannya pembangunan disektor pertanian akan tercipta landasan yang kuat untuk proses transformasi struktur ekonomi dari pertanian kesektor non-pertanian dengan tidak

melupakan adanya masalah utama dalam sektor pertanian itu sendiri, seperti masalah kesempatan kerja, daya dukung sector pertanian serta masalah distribusi pendapatan terutama didaerah pedesaan sebagai daerah basis sektor pertanian serta masalah peningkatan produksi pertanian itu sendiri.

2.3 Pertumbuhan Berimbang dan Analisa Pembangunan Tidak Seimbang

Pertumbuhan berimbang diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, misalnya industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam: (i) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi kepasar, dan (ii) memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksi.

Secara singkat pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama.

Menurut Arthur Lewis (Jhingan 2004:182) akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

Rosenstein-Rodan (Jhingan 2004:182) beranggapan bahwa “Acapkali Produk Marginal Sosial (PMS) dari duatu investasi berbeda dengan Produk Marginal Sosial (PMS)-nya, dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan Produk Marginal Sosial (PMS)-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat jika tidak dirancang secara bersama.”

Jika di sektor pertanian terjadi nyas dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, implikasi yang mungkin timbul adalah : (i) terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat dijual ke sektor non pertanian, (ii) produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan jumlah pengangguran tinggi, dan (iii) kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

Jika saja industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan menurut kelomban tenaga kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar (*Term of Trade*) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh sebab itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi.

Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian maka akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi.

Jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak berkembang, dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. Berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor pertanian saja, maka Lewis menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan secara bersamaan di kedua sektor tersebut.

Analisa Pembangunan Tidak Seimbang Hirschman dan Streeten (dalam Arsyad, 1992: 262 – 270) mengemukakan teori pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola pembangunan tidak seimbang ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (i) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang (ii) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, dan (iii) pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan tidak seimbang adalah bagaimana untuk menentukan proyek ang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia tersebut bias menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Cara

pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cara pilihan pengganti (substitution choice) dan cara pilihan penundaan (postpointment choice). Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang akan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus didahulukan. Berdasarkan prinsip pemilihan proyek di atas, Hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau Social Overhead Capital (SOC) dengan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau Directly Productive Activities (DPA). Ada 3 (tiga) cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan sektor prasarana dan sektor produktif, yaitu: (i) pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut; (ii) pembangunan tidak seimbang, dimana pembangunan sektor prasarana lebih ditekankan; dan (iii) pembangunan tidak seimbang, dimana sektor produktif lebih ditekankan. Kegiatan ekonomi akan mencapai efisiensi yang optimal jika (i) sumber-sumber daya dialokasikan antara sektor DPA dan sektor SOC sedemikian rupa sehingga dengan sumber daya sejumlah tertentu bisa dicapai tingkat produksi yang maksimum; (ii) untuk suatu tingkat produksi tertentu, jumlah seluruh sumber daya yang digunakan di sektor DPA dan sektor SOC jumlahnya minimum. Di kebanyakan negara sedang berkembang, program pembangunan sering lebih ditekankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif.

2.4 Investasi

2.4.1 Pengertian Investasi

Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** dijelaskan, bahwa investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Menurut **Muana Nanga (2001:124)** Investasi (*investment*) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada (*net addition to existing capital stock*). Istilah lain adalah akumulasi modal (*capital accumulation*) atau pembentukan modal (*capital formation*). Dengan demikian, di dalam makroekonomi pengertian investasi atau akumulasi modal itu adalah berbeda atau tidak sama dengan modal (*capital*).

Menurut **Sadono Sukirno (2005:121)**, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut **Josep Schumpeter (Muana Nanga, 2001)**, membedakan investasi kedalam investasi terpengaruh (*induced investment*) dan investasi otonom (*otonomous investment*). Investasi terpengaruh adalah investasi yang besar kecilnya sangat bergantung atau dipengaruhi oleh perubahan dari pendapatan nasional, volume penjualan, keuntungan perusahaan, dll sedangkan investasi otonom yaitu investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi oleh banyak ditentukan oleh perubahan-perubahan yang

bersifat jangka panjang seperti adanya penemuan baru, perkembangan teknologi, dan sebagainya.

Investasi menurut **Konsepsi Keynes** dalam **Kusnendi (2001:60)** dipandang sebagai komponen permintaan agregat yang tidak stabil dan karena itu sifatnya tidak fliktuatif. karena pengeluaran investasi tidak stabil maka bagi keynes investasi ditmpatkan sebagai deteminan terpenting bagi kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional. dengan demikian, sri keynes dapat disederhanakan bahwa *“tinggi rendahnya volume kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional ditentukan oleh tingi rendahnya investasi”*.

Menurut **Paul A. Samuelson dan Wiliam D. Nordhaus (2001:108)**, menyatakan bahwa investasi (pembelian barang-barang modal) meliputi penambahan stok modal atau barang modal di suatu negara, seperti pembangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi saat ini untuk memperbesar konsumsi dimasa yang akan datang.

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Seperti yang dikutip dari buku Makro Ekonomi (**Sadono Sukirno, 2005:122**) dijelaskan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi keputusan Negara (seseorang) untuk melakukan investasi yaitu:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
2. Tingkat suku bunga
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan
4. Kemajuan teknologi

5. Tingkat pendapatan nasional
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Menurut **Paul A. Samuelson** dan **William D. Nordhaus (2001:136)**, kalangan bisnis akan mengadakan investasi bila mereka memperkirakan bahwa pembangunan pabrik baru atau pembelian mesin-mesin baru akan mendatangkan hasil penjualan yang melebihi biaya-biaya investasi. Jadi yang mempengaruhi investasi adalah:

1. Hasil penjualan suatu kegiatan investasi akan memberikan tambahan hasil penjualan bagi perusahaan hanya bila investasi ini mampu menjual lebih banyak.
2. Biaya, karena barang-barang investasi berumur panjang, maka analisis biaya investasi lebih rumit daripada biaya komoditi. Bila membeli barang-barang berumur panjang, kita harus menghitung harga dari kodal itu, dalam hal ini dinyatakan dalam tingkat suku bunga pinjaman.
3. ekspektasi keputusan investasi tergantung pada ekspektasi masa depan, sehingga perlu dilakukan analisis masa depan untuk memperkecil ketidakpastian (*uncertainty*).

Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/mendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada.

Investasi atau penanaman modal di Indonesia merupakan salah satu cara alternatif dalam kegiatan awal berproduksi. Investasi juga pada hakekatnya merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Penggairahan

iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1/ tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan undang-undang No.6/Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam penyelenggaraan investasi di Indonesia pada hakekatnya tidak bisa terlepas dari beberapa komponen-komponen penting dalam berinvestasi, komponen-komponen penting itu diantaranya adalah :

1. Penanaman Modal, adalah kegiatan untuk menyalurkan usaha di Indonesia dengan menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), adalah instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.
3. Persetujuan penanaman modal, adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip fasilitas fiskal dan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap.
4. Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal, adalah izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Persetujuan Penanaman Modal.

5. Sistem Pelayanan Satu Atap, adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Gambaran perkembangan pembangunan daerah secara makro sektoral tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Umumnya pemerintah masih harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus pula.

Usaha pemerataan pembangunan antar daerah juga merupakan faktor lain yang diperhitungkan pemerintah. Pihak swasta tidak berurusan secara khusus dengan faktor-faktor tersebut. Kalaupun ada keterkaitannya, sifatnya tidak langsung, yaitu melalui berbagai peraturan.

2.4.3 Peranan Investasi dalam Perekonomian

Peranan investasi di Negara sedang berkembang selalu diarahkan kepada usaha untuk memperluas skala produksi dan usaha pemanfaatan secara penuh sumber yang ada dalam Negara tersebut. jadi investasi diharapkan bias menaikkan output nasional, kesempatan kerja dan tujuan-tujuan laion seperti memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran.

Investasi terutama dalam peralatan modal memang akan menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan bermuara pada meningkatnya spesialisasi dalam pekerjaan. penggunaan mesin, alat, dan perlengkapan akan semakin meningkat dan mendorong kepada kesempatan kerja baru.

Investasi juga akan menciptakan perlakuan pasar. hal ini tentunya akan berpengaruh pada kesempatan kerja, selain berpengaruh pada penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. perluasan pasar tentunya harus dituning oleh SDM yang bisa menggerakannya. maka secara langsung investasi harus didukung dengan meningkatnya tenaga kerja yang qualified.

JM Keynes yang dikutip oleh Drs. T Gilarso (1991:27)

Investasi memainkan peranan penting di dalam masyarakat terlebih-lebih dalam masyarakat yang sedang membangun. investasi bagaikan motor yang menggerakkan kehidupan ekonomi nasional, karena investasi memperbesar kapasitas produksi, menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan PDB, dan meningkatkan pendapatan.

Meningkatnya investasi akan mendorong tumbuhnya lahan kerja baru yang menciptakan kesempatan kerja baru yang bermuara pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian suatu Negara.

Sementara itu Malayu Hasidjun (1990:112) berpendapat bahwa

Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di Negara sedang berkembang.

Dengan demikian bahwa investasi berperan penting dan strategi dalam menciptakan kesempatan kerja, peningkatan kontribusi PDRB, dan pertumbuhan ekonomi.

2.4.4 Teori Investasi

2.4.4.1 Teori Investasi Keynes

John Maynard Keynes, (Muana Nanga, 2001: 124-126) mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep efisiensi marginal kapital (*marginal efficiency of capital*) atau MEC. **Keynes** berpendapat bahwa rangsangan untuk melakukan investasi tergantung pada hasil dari “efisiensi modal marginal” dan tingkat bunga. MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih (keuntungan tinggi) yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran kapital tambahan, yakni tingkat diskonto (*discount rate*) yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan.

MEC ditentukan oleh 2 faktor:

1. Harapan keuntungan yang diperoleh (*expected yield*).
2. *Replacement* atau *supply price* dari modal yang merupakan sumber *prospected yield*. *Prospected yield* adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari penjualan output yang merupakan aliran pendapatan (*income flow*) selama periode tertentu.

Secara matematis MEC dinyatakan:

$$C_k = \frac{R_1}{(1+MEC)^1} + \frac{R_2}{(1+MEC)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+MEC)^n}$$

Dimana:

- R = Perolehan yang diharapkan (*expected return*) dari suatu proyek
- C_k = Biaya sekarang (*current cost*) dari modal tambahan

Apakah suatu investasi dilakukan atau tidak, sangat tergantung pada perbandingan antara *present value* (PV) dan *current cost of additional capital* (Ck). Jika $PV > Ck$ maka diputuskan investasi dilakukan, sebaliknya $PV < Ck$ diputuskan investasi tidak dilakukan.

$$PV = \frac{R_1}{(1+i)} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \frac{R_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{R_n}{(1+i)^n}$$

Aturan keputusan investasi (*investment decision rule*) diatas dapat ditulis kembali dengan penitungan dibawah ini, dimana investasi akan diputuskan untuk dilakukan jika.

$$\frac{R_1}{(1+i)} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+i)^n} > \frac{R_1}{(1+MEC)^1} + \frac{R_2}{(1+MEC)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+MEC)^n}$$

Yakni jika tingkat perolehan bersih yang diharapkan lebih besar daripada biaya peminjaman dana (*cost of borrowing funds*) atau *opportunity cost* dari penggunaan dana yang dimiliki oleh perusahaan (i) atau jika $MEC > i$.

Kurva MEC menunjukkan hubungan negatif antara akumulasi modal (MEC) dan tingkat bunga terhadap investasi, semakin rendah tingkat bunga (r) semakin besar tingkat investasi (I). Hubungan antara permintaan investasi dan tingkat bunga (r) dengan MEC tertentu, oleh Keynes dinyatakan dalam bentuk fungsi berikut: $I = f(r)$.

Kurva MEC menunjukkan tingkat hasil penanaman modal tahunan sebagai presentase modal yang ditanam, MEC menggambarkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan modal. Sehingga ketika tingkat bunga pasar rendah berarti pengusaha berminat untuk mengalihkan modalnya ke investasi yang memberikan MEC yang lebih besar dan ini berarti investasi akan meningkat ,

demikian sebaliknya ketika tingkat bunga naik: $MEC > \text{tingkat bunga} = \text{investasi}$ dilaksanakan, $MEC < \text{tingkat bunga} = \text{investasi tidak dilaksanakan}$, $MEC = \text{tingkat bunga} = \text{investasi boleh dilaksanakan atau tidak}$ (lihat gambar 2.3).

Kurva MEC menurun dikarenakan:

1. Semakin besar stok kapital, semakin rendah hasil yang diharapkan diperoleh dari penggunaan aset kapital (untuk jangka panjang)
2. Semakin tinggi investasi, semakin tinggi ongkos aset (untuk jangka pendek)



Gambar 2.1 Kurva MEC

Sumber: Muana Nanga, 2001

MEC menjadi kriteria dalam mengambil keputusan investasi, bahwa investasi tergantung dari tingkat bunga dan tingkat bunga yang dibandingkan dengan MEC menunjukkan biaya modal yang dipinjam dan biaya oportunitas bagi pemilik modal, sehingga dapat dibandingkan besarnya biaya dan hasil yang diharapkan (pengembalian modal).

2.4.4.2 Teori Investasi Akselerator

Teori akselerator yang dikembangkan oleh **Jorgenson** (dalam **Muana Nanga, 2001:126-129**) merupakan teori investasi yang itu didasarkan pada

hubungan antara investasi dan produksi, atau dengan kata lain, investasi berkaitan dengan tingkat perubahan pendapatan nasional. Jika pendapatan naik, maka perlu investasi untuk menambah kapasitas guna memproduksi barang konsumsi. Jika pendapatan nasional mengalami penurunan maka tidak diperlukan penggantian peralatan pabrik yang sudah lama, apalagi melakukan investasi barang modal yang baru.

Teori akselerator ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara permintaan barang modal (*capital goods*) dan permintaan akan produk akhir (*final product*). Dalam bentuk yang paling sederhana, teori ini dimulai dengan mengasumsikan adanya *capital-output ratio* (COR) yang tertentu, yang ditentukan oleh kondisi teknis produksi. COR ini menggambarkan tingkat efisiensi dari investasi. Selanjutnya, hubungan antara kapital dan output (COR) tersebut secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\frac{K}{Y} = k \dots \dots \dots (1.1)$$

Dimana:

K = jumlah kapital yang digunakan.

Y = tingkat output agregat.

k = rasio kapital output yang tetap (*fixed capital-output ratio*).

$$K_t = k \times Y_t \dots \dots \dots (1.2)$$

dan

$$K_{t-1} = K \times Y_{t-1} \dots \dots \dots (1.3)$$

Sebab dengan suatu rasio kapital-output yang tetap, maka persamaan (1.1) akan tetap untuk seluruh kurun waktu. Karena investasi bersih (*net investment*)

pada periode waktu t, I_t secara definisi adalah sama dengan perubahan di dalam stok kapital sepanjang kurun waktu t, maka secara matematis dapat dinyatakan:

$$\begin{aligned}
 I &= K_t - K_{t-1} \\
 &= k(Y_t - Y_{t-1}) \\
 &= k \times \Delta Y_t \dots \dots \dots (1.4)
 \end{aligned}$$

Persamaan (1.4) ini menunjukkan bahwa investasi netto (I_t) adalah sama dengan koefisien akselerator (k) dikali dengan perubahan dalam output agregat selama kurun waktu t (ΔY_t). Oleh karena k diasumsikan konstan, maka investasi netto dengan sendirinya menjadi fungsi dari perubahan di dalam output agregat. Kalau output agregat meningkat, maka investasi netto akan positif. Jika output agregat meningkat dengan jumlah yang semakin besar, maka investasi netto akan meningkat dengan jumlah yang lebih besar lagi. Versi yang lebih fleksibel dari model akselerator stok kapital dibedakan ke dalam actual capital stock dan desired capital stock, dan hubungan diantara keduanya ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$K_t - K_{t-1} = \lambda(K^*_t - K_{t-1}) \quad (0 < \lambda < 1) \dots \dots \dots (1.5)$$

Dimana:

K_t = stok kapital aktual pada periode t.

K_{t-1} = stok kapital aktual pada periode t-1.

K^*_t = stok kapital yang diinginkan.

λ = konstanta.

Persamaan (1.5) ini menjelaskan bahwa perubahan aktual di dalam stok kapital dari periode waktu t-1 ke periode waktu t adalah sama dengan suatu fraksi

dari selisih antara stok kapital yang diinginkan dalam periode waktu t dengan stok kapital aktual dalam periode waktu t-1. Apabila $\lambda = 1$, maka stok kapital aktual dalam periode waktu t akan sama dengan stok kapital yang diinginkan.

Menurut model akselerator, stok kapital yang diinginkan (*desired capital stock*), K_t^* ditentukan oleh output (Y_t). Dalam model akselerator versi yang sederhana, stok kapital yang diinginkan adalah proporsional dengan tingkat output tunggal (*single output level*). Namun dalam versi yang lebih fleksibel, stok kapital yang diinginkan dispesifikasi sebagai fungsi dari output sekarang dan output masa lalu. Konsekuensinya, di dalam versi yang lebih fleksibel, stok kapital yang diinginkan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan jangka panjang.

Akhirnya, versi model akselerator yang sederhana bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga selain menjelaskan investasi netto juga dapat menjelaskan investasi bruto. Karena investasi netto, $I_t - D_t =$ perubahan dalam stok kapital, $K_t - K_{t-1}$ selanjutnya akan diperoleh persamaan berikut ini:

$$I_t - D_t = K_t - K_{t-1} = \lambda (K_t^* - K_{t-1}) \dots \dots \dots (1.6)$$

Untuk menentukan investasi bruto, maka umumnya diasumsikan bahwa investasi penggantian (*replacement investment*) adalah proporsional dengan stok kapital aktual. Jadi diasumsikan bahwa investasi penggantian pada periode waktu t, D_t , adalah sama dengan suatu konstanta, δ , dikalikan dengan stok kapital pada akhir periode waktu t-1, K_{t-1} atau:

$$D_t = \delta (K_{t-1}) \quad (0 < \delta < 1) \dots \dots \dots (1.7)$$

Oleh karena investasi netto, $I_t - D_t = \lambda (K_t^* - K_{t-1})$, maka melalui substitusi akan diperoleh persamaan berikut:

$$I_t - \delta K_{t-1} = \lambda (K_t^* - K_{t-1}) \dots \dots \dots (1.8)$$

atau

$$I_t = \lambda (K_t^* - K_{t-1}) + \delta K_{t-1} \dots \dots \dots (1.9)$$

Dimana :

I_t = investasi bruto.

K_t^* = stok kapital yang diinginkan.

K_{t-1} = stok kapital aktual periode waktu t .

2.4.5 Penanaman Modal Asing (PMA)

Dalam upaya menumbuhkan suatu perekonomian, setiap Negara berupaya berusaha menciptakan iklim ekonomi yang dapat mengairahkan investasi. Salah satunya adalah investasi asing yang dapat membantu industrialisasi, over head capital dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Investasi asing tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan teknis. Modal asing membuka daerah terpencil dan menggarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan, selanjutnya modal asing juga membantu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sector pemerintah maupun sector swasta.

Menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld (2002: 204) yang dimaksud investasi asing langsung adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu Negara mendirikan atau memperluas perusahaannya dinegara lain. Ciri yang menonjol dari penanaman modal asing langsung adalah melibatkan bukan hanya pemindahan sumber daya tetapi juga pemberlakuan pengendalian (*control*). Yaitu, cabang atau anak perusahaan tidak hanya memiliki

kewajiban finansial kepada induk perusahaannya, tetapi juga anak perusahaan merupakan bagian dari struktur organisasi yang sama.

Menurut **Hamdy Hady** (2004:92-93) *direct investment* adalah investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal tanah, bahan baku, dan persediaan, dimana para investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. *Direct investment* biasanya dimulai dengan pendirian *subsidiary* atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan.

Menurut **Jhingan** (2004:483) PMA berarti bahwa perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan atas aset (aktiva) yang di tanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu; pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan suatu perusahaan dalam mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas modal; pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal; mendirikan suatu korporasi di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau menaruh aset (aktiva) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal.

Menurut **John Dunning** (Muanananga, 2001:139-140) dengan **Teori Paradigma Ekletika** (The Ecletik Theory of FDI) yang mengidentifikasi 3 faktor yang menjadi factor-faktor penarik terjadinya arus PMA dari suatu Negara ke Negara lain. Ketiga factor tersebut antara lain:

1. Investor harus memiliki keuntungan kepemilikan atas saingan-saingannya di Negara tuan rumah. Keuntungan kepemilikan tersebut bisa dalam bentuk monopoli suatu produk, teknologi yang unik dan canggih, pengetahuan pasar atau teknis pemasaran yang lebih baik.
2. Negara tuan rumah harus memiliki keuntungan lokasi yang menarik bagi investor.
3. Harus ada keuntungan internalisasi yang akan mendorong investor untuk menarik investor menanamkan modalnya secara langsung dari pada menanamkan modalnya dalam bentuk perjanjian-perjanjian lisensi lainnya.

2.4.5.1 Manfaat PMA

Seperti yang kita ketahui bahwa *foreign direct Investment/ (FDI) PMA* mempunyai beberapa keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Menurut Hardy (2004:97) dikatakan bahwa dampak positif dari *foreign direct investment (FDI)/ PMA* adalah:

1. Sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan pembentukan modal (*capital formation*)
2. Dalam *foreign direct investment (FDI)/ PMA* melekat transfer teknologi dan *know-how* dibidang manajemen dan pemasaran.
3. *Foreign direct investment (FDI)/ PMA* tidak akan memberatkan *balance of payment* karena tidak ada kewajiban pembayaran utang dan bunga, sedangkan transfer keuntungan didasarkan kepada keberhasilan *foreign direct investment (FDI)/ PMA* yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut.

4. Meningkatkan pembangunan regional dan sektoral.
5. Meningkatkan persaingan dalam negeri yang sehat dan kewirausahaan.
6. Meningkatkan lapangan pekerjaan.

2.4.5.2 Kaitan PMA dengan Pembangunan

Foreign Direct Investment (FDI) PMA Menurut Sawedi (2002) menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal) yang penting bagi negara berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer aset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara. Sedangkan menurut Panayotou (1998) dalam Sawedi (2002) menjelaskan bahwa PMA lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya PMA disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*.

2.4.5.4 Kaitan Investasi Luar Negeri / PMA dengan perekonomian Jawa Barat

Menurut Endin Ad Soefihara (2002:177), dalam kondisi krisis ekonomi, investasi asing langsung memiliki peranan penting. Hal ini bisa dipahami, sebab masuknya investasi asing memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi. Terutama dalam ikut memacu pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, *transfer of technology*, serta masuknya *capital inflow* serta devisa hasil ekspor. Selain itu, masuknya investasi asing, terutama investasi asing

langsung (*foreign direct investment/ PMA*) diperlukan untuk menggerakkan sektor riil. Sebab sektor riil ibarat sedang mati suri. Sektor ini telah banyak kehilangan kesempatan (*oportunity lost*) untuk beroperasi secara penuh. Hal ini terjadi karena sektor perbankan yang macet, pasar domestik yang belum sepenuhnya pulih dan pasar ekspor yang mengalami stagnasi dan resesi. Setidaknya ada beberapa industri yang selama ini menjadi sektor andalan karena berorientasi ekspor, dan menampung banyak tenaga kerja dan secara langsung merasakan dampak krisis, yakni tekstil dan produk tekstil, garmen dan sepatu. Sektor riil, selain berperan sebagai penyumbang devisa, juga banyak menampung tenaga kerja serta diharapkan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

2.5 Tenaga Kerja

2.5.1 Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja secara mikro adalah orang yang tidak saja mampu melakukan kerja, tetapi juga secara nyata menyumbangkan potensi kerja yang dimilikinya kepada lingkungan kerjanya dengan menerima imbalan upah berupa barang atau uang. Sedangkan pengertian tenaga kerja secara makro adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena tenaga kerja mampu menggerakkan faktor-faktor produksi yang lain untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Berikut ini beberapa pengertian tenaga kerja

1. Menurut **Undang-undang No.25 Tahun 1997** tentang Ketenagakerjaan pada bab I pasal (1), Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki dan wanita yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan baik didalam negeri maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
2. Menurut **Sumitro Djojohadikusumo (1987)**, tenaga kerja adalah semua tenaga yang bersedia dan sanggup termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.
3. Menurut **Payaman J. Simanjuntak (2001:38)**, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 sampai 60 tahun, sedangkan orang-orang yang berumur dibawah 14 tahun atau diatas 60 tahun digolongkan bukan sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan-golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lainnya. Angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja dinamakan tenaga kerja potensial. Dalam sensus penduduk tahun 1971, orang yang bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan paling sedikit

dua hari dalam seminggu sebelum hari pencacahan dinyatakan sebagai bekerja. Juga tergolong sebagai pekerja, mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak bekerja atau bekerja kurang dari dua hari tetapi mereka adalah :

1. Pekerja tetap pada kantor pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok atau mangkir
2. Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang sedang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu 12 hujan untuk mengairi sawahnya; dan
3. Orang yang bekerja dalam bidang keahlian seperti doktor, tukang cukur, dan lain-lain.

Sebaliknya penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (Simanjuntak, 1985:3-5).

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 10 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Simanjuntak, 1985:6).

2.5.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Besar kecilnya elastisitas permintaan terhadap tenaga

kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memungkinkan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lainnya, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan dan elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Semakin kecil kemungkinan mensubstitusi modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja dan semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap dalam produksi, semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja. (Sonny Sumarsono, 2003:81-82)

Perbedaan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja tersebut disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan yang dialami pada masing-masing sektor. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu

1. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masing-masing sektor.
2. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapatan nasional (Simanjuntak, 1998:15).

Permintaan pengusaha akan tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Seseorang mengkonsumsi suatu komoditi karena komoditi tersebut memberikan kegunaan kepadanya. Akan tetapi pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk kemudian dijual kepada konsumen. Permintaan tenaga kerja seperti ini disebut *derive demand*, yaitu

meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa akan menimbulkan tambahan terhadap tenaga kerja. (Sonny Sumarsono,2003:70). Variabel-variabel yang menentukan jumlah tenaga kerja yang diminta suatu perusahaan dianalisa dalam dua tingkat. Pertama, difokuskan pada hubungan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta dengan variabel lain khususnya permintaan terhadap jumlah barang dan jasa. Hubungan antara upah dan kuantitas yang diminta dinamakan kurva permintaan akan tenaga kerja yang mempunyai *slope negatif*, yaitu apabila tingkat upah meningkat maka kesempatan kerja akan menurun. Besarnya lapangan kerja diukur melalui elastisitas dari kurva permintaan. Kedua difokuskan pada faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan kurva permintaan akan tenaga kerja, khususnya perubahan dalam metode produksi serta perubahan permintaan akan barang dan jasa.

2.5 Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja

2.5.3.1 Permintaan Tenaga Kerja

Pandangan *Mainstream Economy* terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (*derived demand*), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja.

Dengan pertimbangan tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusahaan beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan

cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (*Value Marginal Product of Labor, VMPL*) VMP_L menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.

Permintaan akan tenaga kerja itu bersifat derived demand yang berarti bahwa permintaan tenaga kerja oleh pengusaha sangat tergantung permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya. Sehingga untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing untuk aset dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu perusahaan harus benar-benar mempunyai tenaga kerja yang memang mampu membawa perusahaan untuk menghadapi persaingan. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut, produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya (Sonny Sumarsono, 2003:69-70)

Yang menjadi dasar untuk dipergunakan pengusaha dalam menambah atau mengurangi tenaga kerja menurut Simanjuntak (1985:46), adalah :

1. Pengusaha perlu memperkirakan tambahan hasil (output) yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seorang tenaga kerja yang disebut tambahan hasil marginal atau marginal physical Product dari karyawan (MPP_L).

2. Pengusaha menghitung jumlah uang ini dinamakan penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu nilai dari MPP_L tadi. Jadi marginal Revenue sama dengan nilai dari MPP_L dimana besarnya MPP_L dikalikan harga per unit (P).

$$MR = VMPP_L = MPP_L \times P$$

Dimana :

MR : Marginal Revenue

$VMPP_L$: Value Marginal Physical Product of Labor (nilai pertambahan hasil marginal dari Karyawan)

MPP_L : Marginal Physical Product of labor

P : harga jual barang yang diproduksi per-unit.

Selanjutnya marginal revenue dibandingkan dengan biaya mempekerjakan tambahan seorang tenaga kerja atau marginal cost (MC). Apabila marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka pengusaha akan memperoleh keuntungan dengan mempekerjakan tambahan tenaga kerja. hal ini akan berlangsung terus selama marginal revenue lebih besar dari upah (W) atau marginal cost.

Apabila tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat faktor produksi lain jumlahnya tetap maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula. Dengan kata lain, semakin bertambah tenaga kerja yang dipekerjakan maka semakin kecil MPP_L nya dan nilai dari MPP_L itu sendiri. Ini dinamakan hukum tambahan produksi yang semakin menurun (The Law of

Diminishing Return). Dengan berlakunya hukum tambahan produk yang semakin menurun ini serta harga produk ditentukan pasar. Maka nilai produk tambahan tenaga kerja ($VMPP_L$) yang identik dengan kurva permintaan tenaga kerja berbentuk miring ke bawah (**lihat gambar dibawah**) mempekerjakan tambahan seorang tenaga kerja atau marginal cost (MC). Apabila marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka pengusaha akan memperoleh keuntungan dengan mempekerjakan tambahan tenaga kerja. hal ini akan berlanjut terus selama marginal revenue lebih besar dari upah (W) atau marginal cost.



Garis DD melukiskan besarnya nilai hasil pekerja ($VMPP_L$) untuk setiap tingkat penempatan. Misalnya bila pekerja yang dipekerjakan sebesar $ON_1 = 100$ orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan $VMPP_L$ -nya dan besarnya sama dengan $MPP_L \times P = W_1$, nilai ini lebihj besar dari tingkat upah

yang sedang berlaku (W), oleh sebab itu laba pengusaha akan bertambah dengan menambah tenaga kerja baru.

Produsen akan mempertahankan penggunaan tenaga kerja sebesar ON dengan tingkat upah setinggi OW , karena pada tingkat ini produsen akan memperoleh laba maksimal, dimana $VMPP_L$ sama dengan upah yang dibayarkan kepada pekerja. Penambahan tenaga kerja lebih besar dari ON misalkan sebesar ON_2 akan mengurangi keuntungan produsen. Produsen membayar upah dalam tingkat yang berlaku (W), pada hal ini hasil marginal yang diperoleh hanya sebesar W_2 yang lebih kecil dari W , jadi produsen cenderung untuk menghindari jumlah pekerja lebih besar dari ON . Penambahan pekerja yang lebih besar dari ON dapat dilakukan hanya bila produsen yang bersangkutan dapat membayar upah pekerja dibawah W .

Dikarenakan luasnya model permintaan pada tenaga kerja, maka asumsi yang digunakan untuk permintaan pasar akan tenaga kerja yang dikemukakan Don Bellente dkk (2000:45) agar tidak terjadi kerancuan, antara lain :

1. Semua Tenaga Kerja adalah homogen
2. Semua pekerja memiliki pengetahuan dan mobilitas yang sempurna.
3. Semua pekerjaan diasumsikan sama dapat disepakati / tidak dapat disepakati
4. Semua majikan bersaing sepenuhnya, baik dalam pasar produk maupun pasar bagi faktor produksi

5. Ukuran angkatan kerja telah diberikan, jadi jumlah tenaga kerja yang dapat diperoleh bagi pekerjaan diasumsikan sudah tertentu dan bersifat tidak peka terhadap tingkat upah
6. Tingkat permintaan secara menyeluruh (agregat)
7. Semua harga produk dan upah bersifat fleksible sepenuhnya.

2.5.3.2. Perubahan Permintaan Tenaga Kerja

Perubahan tingkat upah mengakibatkan perubahan dalam permintaan tenaga kerja. persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah disebut elastisitas permintaan akan tenaga kerja. besarnya perubahan permintaan akan tenaga kerja dalam jangka pendek tergantung dari besarnya elastisitas permintaan akan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh :

1. Kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal. Makin kecil kemungkinan mensubstitusi modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja. bila suatu teknik produksi mempergunakan modal dan tenaga kerja dalam perbandingan yang tetap, maka perubahan tingkat upah tidak mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja paling sedikit dalam jangka pendek. Elastisitas semakin kecil bila keampilan tenaga kerja semakin tinggi dan semakin khusus. Sebaliknya elastisitas semakin besar bila keahlian tenaga kerja semakin rendah
2. Elastisitas permintaan akan hasil produksi Salah satu alternatif pengusaha adalah membebaskan kenaikan tingkat upah kepada konsumen dengan

menaikkan harga jual barang hasil produksi. Kenaikan harga jual ini menurunkan jumlah permintaan masyarakat akan hasil produksi. Selanjutnya turunnya permintaan masyarakat akan hasil produksi mengakibatkan penurunan jumlah permintaan akan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permintaan akan terhadap hasil produksi maka semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

3. Proporsi biaya tenaga kerja terhadap jumlah seluruh biaya produksi. Elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi keseluruhan juga besar. Hal ini tampak pada perusahaan yang menggunakan metode produksi padat modal pada perusahaan ini rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya produksi kecil, sehingga perubahan tingkat upah tidak berpengaruh terhadap biaya produksi yang selanjutnya terhadap tingkat harga dan tingkat produksi. Sedangkan perusahaan yang padat karya, perubahan yang terjadi pada biaya tenaga kerja akan sangat berpengaruh terhadap permintaan akan tenaga kerja.

4. Elastisitas persediaan dari faktor-faktor pelengkap yang lain. Elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan dari bahan-bahan pelengkap dalam produksi seperti modal, bahan mentah dll. Semakin banyak faktor pelengkap atau bahan mentah yang perlu diolah makin banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk menanganinya. Jadi semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap dalam produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

Sesuai perkembangan waktu, menurut **Arfidah (2002:50-57)** dalam jangka panjang perubahan permintaan akan tenaga kerja dalam bentuk shift dapat terjadi karena :

1. Pertambahan hasil produksi.

Pembangunan ekonomi nasional biasanya mengakibatkan beberapa sektor tumbuh dengan lambat, akibatnya terjadi ketimpangan penghasilan ketimpangan ini akan berimbas pada pola konsumsi. Golongan yang berpenghasilan besar akan mempunyai tambahan yang besar akan barang-barang. Tambahan permintaan akan barang-barang, tersebut akan menimbulkan perubahan dalam permintaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan dimana barang itu diproduksi.

2. Peningkatan produktivitas kerja

Perubahan terhadap permintaan tenaga kerja dapat terjadi karena peningkatan produktivitas kerja. Produktivitas kerja dapat mempengaruhi kesempatan kerja melalui tiga cara. Disatu pihak, peningkatan produktivitas kerja berarti bahwa untuk memproduksi hasil dalam jumlah yang sama diperlukan karyawan lebih sedikit. Dipihak lain, peningkatan produktivitas kerja menurunkan biaya produksi perunit barang. Dengan menurunnya biaya produksi perunit, harga jual barang akan menurun, oleh sebab itu permintaan masyarakat akan barang tersebut akan bertambah dan akhirnya mendorong pertambahan produksi dan selanjutnya menambah permintaan akan tenaga kerja. Alternatif lain adalah pengusaha dapat menaikkan upah tenaga kerja sehubungan dengan meningkatnya produktivitas kerja dan meningkatnya

pendapatan tenaga kerja akan menambah daya beli mereka, sehingga permintaan mereka akan konsumsi hasil produksi bertambah juga. Selanjutnya pertambahan permintaan akan hasil produksi tersebut akan menaikkan permintaan tenaga kerja.

3. Penggunaan teknologi baru

Faktor lain yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan akan tenaga kerja adalah perubahan dalam metode produksi. Perubahan metode produksi di satu pihak menambah permintaan akan tenaga kerja dalam keahlian tertentu, tetapi di pihak lain akan mengurangi permintaan tenaga kerja dalam keahlian yang lain.

2.5.3.3 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan tingkat upah yang berlaku. Penawaran tenaga kerja pada suatu daerah adalah suatu penjumlahan dari seluruh tenaga kerja yang tersedia di daerah tersebut.

Secara umum, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, struktur umur dan lain-lain. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak misalnya, akan semakin jumlah penduduk yang tergolong tenaga kerja.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, misalnya ada yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain sebagai penerima pendapatan. Jadi

semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil jumlah penyediaan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang siap kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar itu sendiri.

Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu, dimana tidak sama di antara setiap orang. Selain itu penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Produktivitas kerja seseorang dipengaruhi oleh motivasi dari tiap-tiap individu, tingkat pendidikan dan latihan yang sudah diterima (Simanjuntak, 2001:49).

Permintaan tenaga kerja suatu sektor dalam pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari pengaruh kemampuan sektor lain dalam menyerap tenaga kerja lebih dari 75% lapangan kerja di luar sektor pertanian di negara sedang berkembang diciptakan oleh perusahaan kecil dan menengah di sektor industri pengolahan, perdagangan dan selebihnya di sektor jasa.

Di Indonesia, khususnya Jawa Barat semakin sempitnya daya serap sektor modern terhadap perluasan kesempatan kerja telah menyebabkan sektor tradisional merupakan tempat penampungan angkatan kerja. Lapangan kerja terbesar yang dimiliki Indonesia pada saat ini berada pada sektor informal, hal ini disebabkan karena sektor informal mudah dimasuki oleh para pekerja karena tidak banyak memerlukan modal, kepandaian dan ketrampilan (Sonny Sumarsono, 2003:81), karena dalam memasuki sektor informal masyarakat dapat memiliki jenis usaha yang beranekaragam dan dibutuhkan modal yang relatif kecil sehingga jumlah sektor informal banyak dan

tersebar merata. Sektor informal dapat berfungsi sebagai katup pengaman untuk menampung ledakan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja sementara menunggu kegiatan ekonomi membaik (Simanjuntak, 1985).

Dapat dilihat gambar dibawah ini yang menunjukkan kurva penawaran tenaga kerja :



Sebuah kurva penawaran tenaga kerja, pada upah semula OW jumlah tenaga kerja yang disediakan adalah QQ_1 , pada upah yang lebih tinggi OW_1 jumlah penawaran meningkat ke QQ_2 , pada upah OW_2 jumlah tenaga kerja menurun sampai ke QQ_3 . Dengan cara ini, kurva penawaran tenaga kerja ini mempunyai bagian yang melengkung ke belakang : upah tertinggi mengakibatkan pengurangan jam kerja yang disediakan oleh individu. Jadi, hubungan negative antara upah jam kerja yang merupakan suatu kemungkinan teoritis yang dapat dipahami dengan cara membuka kekusutan pengaruh pendapatan yang disebabkan pengaruh upah dari pengaruh substitusi.

Secara umum, penawaran tenaga kerja menurut **Simanjuntak** (1985:27) dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu : jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, dan struktur umur.

Analisis tradisonal terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu nonkerja (*leisure*). *Leisure* dalam hal ini meliputi segala kegiatan yang tidak mendatangkan pendapatan secara langsung, seperti istirahat, merawat anak-anak, bersekolah, dan sebagainya. Pilihan tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu dari dua jenis kegiatan ini yang akan menempatkan berapa tingkat imbalan (upah) yang diharapkan oleh tenaga kerja. Preferensi subyektif seseorang yang akan menentukan berapa besar jam kerja optimal yang ditawarkan dan tingkat upah yang diharapkan.

Ekonom memandang bahwa *leisure* merupakan kebutuhan pokok manusia sementara upah juga merupakan barang normal (semakin banyak semakin disukai). Tenaga kerja dianggap tidak suka pada jam bekerja namun suka pada pendapatan dan *leisure*. Oleh karena itu penawaran tenaga kerja berhubungan positif dengan tingkat upah, namun karena *leisure* juga diinginkan oleh tenaga kerja, maka penawaran tenaga kerja bersifat *backward bending* (bengkok ke belakang). Pada tingkat upahnya meningkat karena ingin mempertahankan jam *leisure*-nya (untuk mengurus keluarga dan sebagainya).

2.6 Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Tolok ukur kemajuan ekonomi, meliputi pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi pembayaran luar negeri. Pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan juga akan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesempatan kerja penduduk sehingga akan meningkatkan *Agregat Supply*. Pergeseran *Agregat Supply*, secara teoritis dapat diturunkan dari fungsi produksi agregat dan keseimbangan pasar tenaga kerja, yang secara matematis ditulis:

$$Y = f (N, T, K, SDM, INF)$$

Peningkatan teknologi, sumberdaya manusia dan infra struktur produksi akan menyebabkan fungsi produksi meningkat sehingga agregat supply juga meningkat.

Keterangan: Y = produksi

N = tenaga kerja

K = teknologi

SDM = sumber daya manusia

INF = infrastruktur

NS = penawaran tenaga kerja

W = tingkat upah

ND = permintaan tenaga kerja

$$NS-ND = L (W/P)$$

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan Pembangunan Ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi mikro pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. (Tulus Tambunan, 2003:40-41)

2.7 Kaitan Investasi Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Harrod-Domar (Suryana, 2001:69) berpendapat bahwa pembentukan modal atau akumulasi modal merupakan suatu keharusan dalam pembangunan ekonomi, karena untuk melakukan pembangunan tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar supaya produksi (output) nasional yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Semakin banyak dana atau modal yang tersedia maka semakin pesat kontribusi PDRB yang disumbangkan untuk pembangunan ekonomi yang

dilaksanakan, karena akan semakin besar investasi yang dapat ditanamkan di berbagai sektor.

Pentingnya investasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB harus bisa menyelamatkan setiap usaha ekonomi melalui proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan untuk investasi baru. Menurut Harrod-Domar (Suryana, 2001:66) ada kaitan ekonomi yang langsung antara besarnya stok modal (I) dengan jumlah produksi nasional (Y). Teori Harrod-Domar (Suryana, 2001:66) menyatakan bahwa investasi baru menjadi suatu keharusan untuk dijadikan sebagai modal pembangunan ekonomi. Jika tidak, jalannya perekonomian akan terhambat dan nilai tambah untuk PDRB pun akan semakin kecil.

2.8 Kaitan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Krisis moneter yang hampir terjadi di semua negara berakibat permintaan akan barang dan jasa mengalami penurunan yang sangat tajam. Turunnya permintaan berdampak aktivitas perusahaan mengalami stagnasi atau penurunan atau bahkan menghentikan produksinya. Bersamaan dengan itu penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan yaitu baik yang disebabkan karena penambahan penduduk maupun dari tenaga kerja yang terpaksa menganggur, karena turunya aktivitas produksi.

Kondisi diatas ternyata paralel dengan hasil studi dalam tulisan ini maupun hasil studi yang dilakukan oleh ILO, dimana sektor pertanian ternyata mampu menunjukkan perkembangan penyediaan tambahan lapangan kerja atau

dengan kata lain dampak krisis tidak berdampak negatif terhadap sektor pertanian. Sebaliknya sektor lain justru mengalami pertumbuhan lapangan kerja yang negative.

2.9 Kaitan Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Pertumbuhan yang cepat merupakan tujuan dari suatu perekonomian. Indikator pertumbuhan ekonomi itu sendiri dilihat dari besar kecilnya PDB untuk pusat dan PDRB untuk daerah. Untuk mencapai pertumbuhan yang cepat setiap daerah berusaha untuk menghasilkan PDRB yang besar. Untuk mencapai hal tersebut, setiap daerah berupaya mencari modal yang besar untuk pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa faktor yang sangat penting bagi lancarnya pembangunan adalah modal. Baik itu modal yang berupa investasi ataupun modal dalam bentuk sumber daya manusia atau yang lebih kita kenal dengan *human investmen*. Kedua faktor tersebut mempunyai peranan sentral dalam proses pembangunan. Besar kecilnya PDRB ditentukan oleh besar kecilnya investasi yang terdapat pada suatu daerah. Bila investasi disuatu daerah tinggi maka PDRB daerah tersebut akan lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki investasi yang kecil. Kondisi ini akan lebih baik jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Perpaduan keduanya mempunyai peranan penting terhadap PDRB yang dihasilkan.

Sektor pertanian di Jawa Barat merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Tetapi demikian sektor ini belum mampu memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Jawa Barat. Pemberi kontribusi terbesar PDRB di

Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan. Sektor pertanian hanya berada pada peringkat ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat belum dikatakan berimbang. Hal ini sama dengan pendapat **Malthus** yang dikutip oleh **Suryana (2001:56)** yang menyebutkan bahwa salah satu sasaran dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi adalah melalui pertumbuhan berimbang di sektor pertanian dan sektor industri. Sehingga peranan modal, yaitu modal untuk investasi dan modal manusia (*human capital*) atau investasi sumber daya manusia dilihat sebagai sumber utama dari pertumbuhan produktivitas. Dan pertumbuhan produktivitas itu sendiri pada gilirannya merupakan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi (**Muana Nanga, 2001:298**). Dari penelitian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa investasi yang terdiri dari investasi modal dan manusia berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi investasi modal dan manusia sebagai tenaga kerja akan mengakibatkan semakin tingginya PDRB yang dihasilkan.

2.10. Kerangka pemikiran

Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi klasik menurut **Adam Smith** dan **David Ricardo** dalam **Arsyad Lincoln (1992:289)** adalah

$$Y = f(R, L, K)$$

Dimana :

$$Y = \text{Pendapatan}$$

R = Resources (SDM)

L = Labour (tenaga kerja)

K = Capital (modal)

Dewasa ini ilmu pengetahuan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan, tenaga kerja terdidik, yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan nasional. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan modal mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan hal tersebut membutuhkan investasi untuk pendidikan riset dan pengembangan.

Faktor produksi modern menurut De Janvry dalam Arsyad Lincoln (1997: 291) adalah

$$Y = F(K_R, R), g(K_L, L)$$

Dimana :

K_R = modal yang digunakan untuk investasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya alam

K_L = modal yang digunakan untuk investasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tingkat pendapatan (Y) dipengaruhi oleh variable tanah dan sumber daya lain (R) serta tenaga kerja (L), sedangkan modal dibutuhkan untuk peningkatan kualitas sumber daya alam dan tenaga kerja.

Hal ini sejalan seperti yang diungkap oleh M. Suparmoko dalam **Idham Khalik** (2002: 56), bahwa kapasitas produksi suatu perekonomian dapat dilihat dari suatu fungsi produksi :

$$Y = f(L, K, R, T, S)$$

Dimana :

Y = besarnya output

L = jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk keperluan produksi

K = capital yang tersedia untuk keperluan produksi

R = SDA riil

T = pengetahuan teknik yang digunakan

S = karakteristik social dan budaya yang mempengaruhi perekonomian dalam menghasilkan output.

Dalam fungsi produksi diatas K dan L merupakan input langsung yang mempengaruhi output, sedangkan R, T, S mempengaruhi besarnya output secara tidak langsung.

Menurut Mankiw (2003:87), dua faktor produksi yang penting adalah modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat sarana yang digunakan oleh para pekerja, sedangkan tenaga kerja adalah orang yang menghabiskan waktu untuk bekerja. Efisiensi tenaga kerja berarti mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, ketika teknologi mengalami kemajuan maka efisiensi tenaga kerja meningkat.

Analisa Pembangunan Seimbang Lewis (Lincoln Arstad, 1992: 257-259), menunjukkan bahwa perlunya pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri. Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan

antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

Lewis (**Lincoln Arsyad**, 1992:260-264), menggunakan gambaran dibawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalnya di sektor pertanian terjadi invasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, implikasinya yang mungkin timbul adalah : (i) terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat dijual ke sektor non pertanian, (ii) produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan jumlah pengangguran tinggi, dan (iii) kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

Jika saja industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor-sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan tenaga kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri maka nilai tukar (Term of Trade) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh sebab itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi beransang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi.

Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian maka akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan barang-barang tersebut.

Jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak berkembang, dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. Berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor pertanian saja, maka Lewis menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan secara bersamaan di kedua sektor tersebut.

Analisa Pembangunan Tidak Seimbang Hirschman dan Streeter (Lincoln Arsyad 1992:264–270) mengemukakan teori pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola pembangunan tidak seimbang ini menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (i) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang, (ii) untuk memperinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, dan (iii) pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan tidak seimbang adalah bagaimana untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Cara

pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cara pilihan pengganti (substitution choice) dan cara pilihan penundaan (postpointment choice). Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang akan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus didahulukan. Berdasarkan prinsip pemilihan proyek diatas, Hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau Social Overhead Capital (SOC) dengan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau Directly Productive Activities (DPA). Ada 3 (tiga) cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan sektor prasarana dan sektor produktif, yaitu: (i) pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut, (ii) pembangunan tidak seimbang, dimana pembangunan sektor prasarana lebih ditekankan, dan (iii) pembangunan tidak seimbang, dimana sektor produktif lebih ditekankan. Kegiatan ekonomi akan mencapai efisiensi yang optimal jika (i) sumber-sumber daya dialokasikan antara sektor DPA dan sektor SOC sedemikian rupa sehingga dengan sumber daya sejumlah tertentu bisa dicapai tingkat produksi yang maksimum, (ii) untuk suatu tingkat produksi tertentu, jumlah seluruh sumber daya yang digunakan di sektor DPA dan sektor SOC jumlahnya minimum. Di kebanyakan negara sedang berkembang, program pembangunan sering lebih ditekankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif.

Menurut penelitian **Makmun dan Akhmad Yasin** (2003:77-78), keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.. Dalam bukunya **Muan Nanga** (2001:298), investasi baik itu investasi berupa modal dan investasi manusia sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB. Maka dari teori tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi investasi yang ditanamkan maka mengakibatkan semakin tinggi pula PDRB yang dihasilkan.

Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada.

Investasi menurut **Konsepsi Keynes** dalam **Kusendi** (2001:60) dipandang sebagai komponen permintaan agregat yang tidak stabil dan karena itu sifatnya tidak fluktuatif. karena pengeluaran investasi tidak stabil maka bagi keynes investasi ditempatkan sebagai determinann terpenting bagi kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional. dengan demikian teori keynes dapat dapat disederhanakan bahwa “tinggi rendahnya volume kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional ditentukan oleh tingi rendahnya investasi”.

Joseph. A schumpeter dalam **Muana Nanga (2001:124)** membedakan investasi ke dalam investasi berpengaruh (*induced invesment*) dan investasi otonom (*otonomious invesment*). investasi berpengaruh (*induced invesment*) adalah investasi yang besar kecilnya sangat bergantung atau dipengaruhi oleh perubahan di dalam pendapatan nasional, volume penjualan, keuntungan perusahaan, dan lain-lain. investasi otonom (*otonomious invesment*) adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh oleh tingkat pendapatan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh perubahan-perubahan yang bersifat jangka panjang seperti adanya penemuan baru, perkembangan teknologi dan sebagainya. faktor-faktor yang menentukan tingkat investasi adalah :

1. tingkat keuntungan yang diperoleh
2. suku bunga
3. ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan
4. kemajuan teknologi
5. tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya
6. keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Gambaran perkembangan pembangunan daerah secara makro sektoral tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Usaha pemerataan pembangunan antar daerah juga merupakan faktor lain yang diperhitungkan pemerintah. Pihak swasta tidak berurusan secara khusus dengan faktor-faktor tersebut. Kalaupun ada keterkaitannya, sifatnya tidak langsung, yaitu melalui berbagai peraturan (**Idham Khalik, 2002 : 15**)

Investasi juga akan menciptakan perluasan pasar. hal ini tentunya akan berpengaruh pada kesempatan kerja, selain berpengaruh pada penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. perluasan pasar tentunya harus ditunjang oleh SDM yang bisa menggerakannya. maka secara langsung investasi harus didukung dengan meningkatnya tenaga kerja yang qualified.

JM Keynes yang dikutip oleh **Drs. T Gilarso (1991:27)**

Investasi memainkan peranan penting di dalam masyarakat terlebih lebih dalam masyarakat yang sedang membangun. investasi bagaikan motor yang menggerakkan kehidupan ekonomi nasional, karena investasi memperbesar kapasitas produksi, menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan PDB, dan meningkatkan pendapatan.

Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elastisitas penawaran parsial, karakteristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produksi. Secara historis, perbedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya bergaining position antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga.

Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan

modal, dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja.

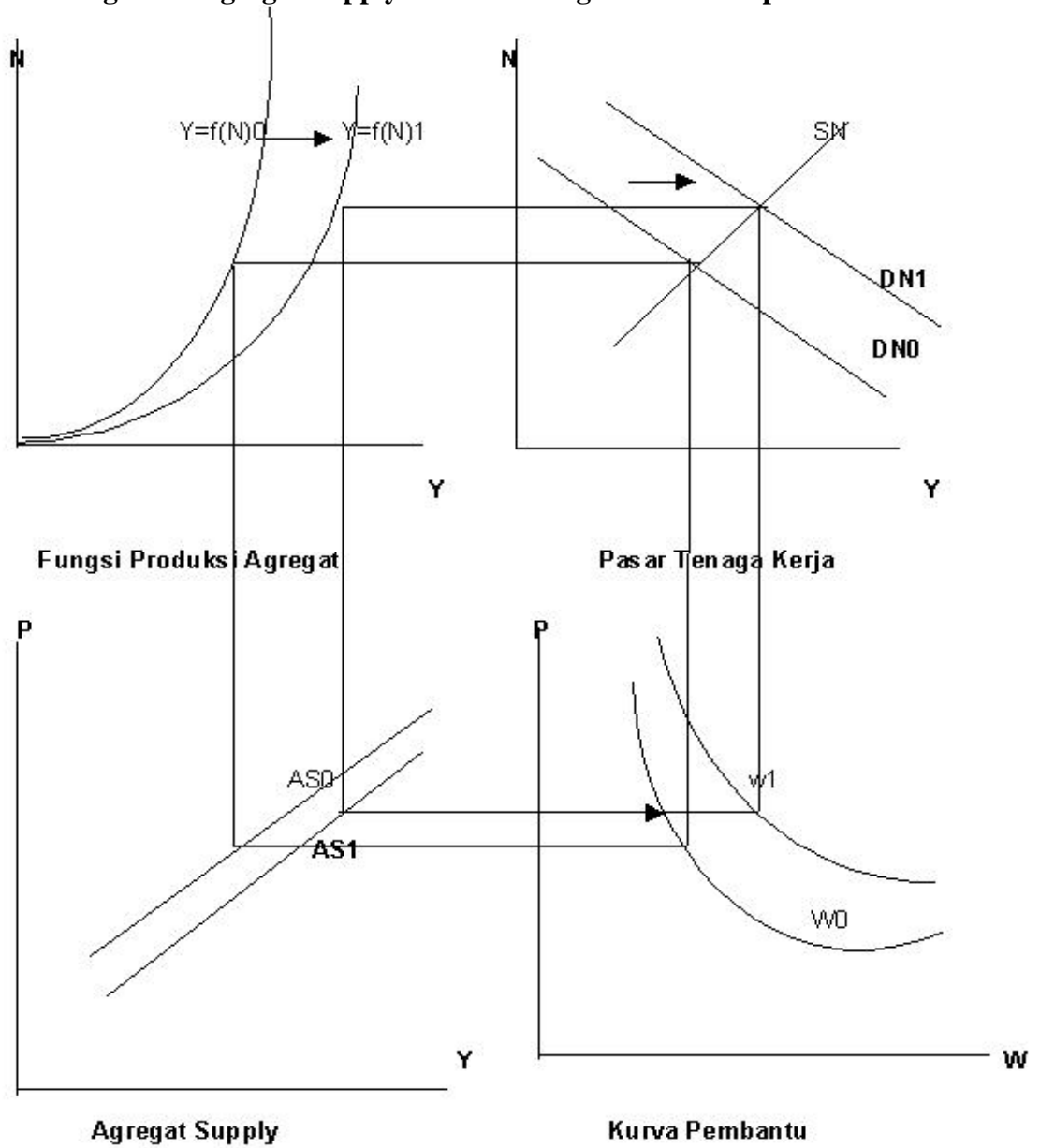
Pandangan Mainstream Economy (**Kusnendi, 2002:39**) terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (derived demand), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja, dengan asumsi usaha beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (Value Marginal Product of Labor, VMPL) VMPL menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.

Hasil penelitian Suryana, A dan Kariyasa, K dalam **Joham Khalik (2002:67)** tentang pengembangan Sistem Usaha Tani Padi dengan Wawasan Agribisnis (SUTPA) di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat menunjukkan bahwa secara finansial, dengan teknologi yang lebih baik akan memberikan keuntungan kepada petani sebesar 14,1% - 24,1% lebih tinggi dari pada teknologi petani. Pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan juga akan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesempatan kerja penduduk sehingga akan meningkatkan Agregat Supply. Pergeseran Agregat

Supply, secara teoritis dapat diturunkan dari fungsi produksi **Cobb-Douglas** agregat dan keseimbangan pasar tenaga kerja dalam **Soekartawi** (1995:69), yang secara matematis ditulis $Y = f(N, T, K, SDM, INF)$. Peningkatan teknologi, sumber daya manusia dan infrastruktur produksi akan menyebabkan fungsi produksimeningkatsehinggaagregatsupply juga meningkat, yang ditunjukkan pada diagram 1.



Diagram.1
Peningkatan Agregat Supply Akibat Peningkatan Kurva produksi



Keterangan :

- Y = produksi
- N = tenaga kerja
- K = teknologi
- SDM = sumber daya manusia
- INF = infrastruktur

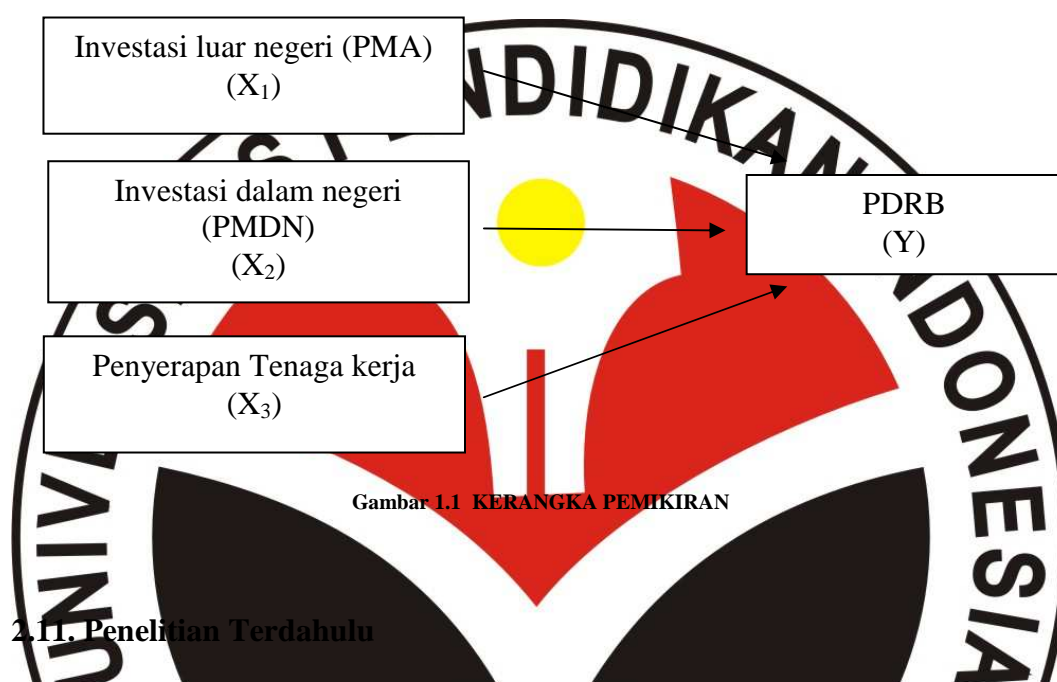
NS = Penawaran tenaga kerja

W = tingkat upah

ND = permintaan tenaga kerja

$NS - ND = L (W/P)$

$\partial Y / \partial N > 0, \partial Y / \partial NT > 0, \partial Y / \partial SDM > 0, \partial Y / \partial INF > 0$



Gambar 1.1 KERANGKA PEMIKIRAN

2.11. Penelitian Terdahulu

Peneliti (1)	Tahun (2)	Judul Penelitian (3)	Hasil Penelitian (4)
Akhmad Yasin dan Makmun	2003	<i>Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Indonesia periode tahun 1980-2002</i>	Hasil empiris: 1. bahwa investasi secara umum berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB dalam periode 1980-2002, namun apabila di-breakdown pengaruh investasi yang bersumber dari PMA tidak signifikan 2. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa basis ekonomi pada pertengahan 1997 ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian. 3. Koefisien tenaga kerja tidak berdampak signifikan bahkan negatif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan produksi.
I Wayan Rusastra dan M. Suryadi	2004	<i>Ekonomi tenaga kerja pertanian dan implikasinya dalam</i>	Hasil empiris: 1. kesempatan tenaga kerja pertanian selama periode 1995-2000 meningkat sebesar

		<i>peningkatan produksi dan kesejahteraan buruh tani</i>	<p>0.51% pertahun. Posisinya tetap dominan (45.28%) atau sebesar 5,38 juta orang.</p> <p>2. Terdapat indikasi kelangkaan tenaga kerja dan kenaikan tingkat upah absolut, namun tingkat upah riil menjadi lambat. Elastisitas tenaga kerja terhadap produksi relatif tinggi (0,31) dan tingkat upah berdampak negatif inelastis terhadap penawaran dan keuntungan usaha tani padi.</p>
Suryana, A. dan Kariyasa, K	2002	Pengembangan Sistem Usaha Tani Padi dengan Wawasan Perencanaan Strategis (SUT-PS) di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat	<p>Analisis menggunakan fungsi <i>Cobb-Dougllass</i></p> <p>Hasil empiris:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara matematis ditulis $Y = f (N, T, K, L, M, INT)$ Peningkatan teknologi, sumber daya manusia dan infrastruktur produksi akan menyebabkan fungsi produksi meningkat sehingga agregat supply juga meningkat bahwa secara finansial, dengan teknologi yang lebih baik akan memberikan keuntungan kepada petani sebesar 14,1% - 24,1% lebih tinggi dari pada teknologi petani. Pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan juga akan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesempatan kerja penduduk sehingga akan meningkatkan Agregat Supply
Siti Fatimah NH	2007	<i>Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 1980-2002</i>	<p>Hasil empiris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil estimasi OLS dengan model koreksi kesalahan E-G menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh dan signifikan secara statistik dalam jangka pendek adalah investasi dalam negeri tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang negatif terhadap investasi dalam negeri. Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh dan signifikan secara statistik adalah variabel suku bunga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap investasi dalam negeri.